



Kenaikan Parkir Non-AB Ditolak

Wali Kota: DPRD Kota Silakan Minta ke Pemprov DIY

YOGYAKARTA (SINDO)—Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto menolak tegas usulan Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta yang menginginkan pemberlakuan tarif parkir yang lebih tinggi bagi kendaraan berpelat non-AB.

Pertimbangan atas penolakan ini adalah terkait predikat Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata dan pendidikan. "Kalau Dewan menginginkan itu, jangan ke kami (Pemkot Yogyakarta). Minta sana sama provinsi. Karena, kewenangan itu ada di sana (pemprov)," katanya sesuai menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Perparkiran di Ruang Paripurna DPRD Kota Yogyakarta kemarin.

Orang nomor satu di Kota Gudeg ini juga tidak sepekat dengan usulan lain yang menginginkan agar pemkot memberikan biaya gratis bagi mutasi kendaraan bermotor dari luar Provinsi DIY. Alasannya, yang membidangi persoalan itu bukanlah pihak pemkot melainkan kewenangan Pemprov DIY. "DPRD Kota rembugan dulu sama DPRD Provinsi sana," tukasnya.

Seperti diberitakan SINDO sebelumnya, FPDIP menginginkan agar tarif parkir bagi kendaraan pelat non-AB dinaikkan hingga sepuluh kali lipat. Alasan utamanya, kendaraan pelat non-AB ikut menikmati sarana dan prasarana jalan yang disediakan pemerintah Kota Gudeg. FPDIP menganggap, sebuah hal yang tidak adil jika kendaraan pelat non-AB ikut menikmati sarana dan prasarana jalan tapi pembayaran pajaknya di luar kota.

Di kalangan DPRD kota sendiri, wacana ini menjadi perdebatan seru. Anggota Fraksi Demokrat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Supriyanto Untung mengaku mendukung penuh wacana yang digulirkan FPDIP. Menurut dia, selama ini Kota Yogyakarta terlalu dipadati kendaraan dari luar kota. Ironisnya, mereka membayar pajak di luar kota.

"Ini cara untuk meningkatkan pajak dan retribusi yang nantinya bisa digunakan untuk memperbaiki sarana jalan yang rusak. Karena, kerusakan jalan di Kota Yogyakarta itu juga banyak disebabkan oleh mereka," tudingnya.

Ketua Fraksi Demokrat Agus Prasetyo mengatakan, apa yang disampaikan Supriyanto Untung tidak mewakili fraksinya. Karena, Fraksi Demokrat secara tegas menolak wacana tersebut. Dia khawatir jika kebijakan ini diterapkan akan menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya mempengaruhi kondusifitas Kota Yogyakarta sebagai kota wisata dan pendidikan. "Pendapat fraksi secara resmi adalah menolak wacana itu. Kami tidak ingin ada dikotomi antara kendaraan kota dan luar kota," katanya.

Senada dengan pendapat tersebut, Ketua Fraksi PAN Awang Nuryanto kurang sepekat dengan rencana kenaikan tarif parkir bagi kendaraan berpelat non-AB. Karena, pelaksanaan di lapangan sulit diawasi. Dia lebih sepekat, kalau tarif memang akan dinaikkan, maka dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan pelat nomor kendaraan.

Tembusan Kepada Yth :

INSTANSI	NILAI BERITA	SIFAT
Dinas Perhubungan	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat segera <input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi

(arif budianto)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Perparkiran			

Yogyakarta, 09 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005